

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sofifi merupakan ibu kota Maluku Utara yang secara administratif masih berada di Kota Tidore Kepulauan. Kedudukan Sofifi sebagai ibu kota Provinsi sudah ditetapkan sejak pertama kali pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999, Tetapi baru diresmikan sebagai pusat pemerintahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Agustus 2010. Keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur di kota tersebut. Kota Ternate dijadikan ibu kota sementara selama periode 1999 hingga 2010 tersebut. (Wikipedia)

Ketertinggalan pembangunan di Indonesia Timur bukan masalah baru. Misalnya, pada 2010, tingkat kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia Timur berkisar antara 20% hingga 30%, seperti di Nusa Tenggara Timur (23,03%), Maluku (27,74%), Papua Barat (34,88%), dan Papua (36,80%). Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga rendah di NTT (59,21), Maluku (64,27), Papua (54,45) dan Papua Barat (59,60).

Sebagian besar proyek pembangunan “strategis nasional” Jokowi di Indonesia Timur terkonsentrasi di provinsi Sulawesi Selatan, terutama di ibukota Makassar, maka dari itu laju pembangunan daerah Timur yang lain masih belum terlalu pesat.

Sabtu (14/9/2019) malam dalam rapat penyusunan rancangan awal RPJMN, Wakil Gubernur Maluku Utara M Al Yasin Ali mengusulkan percepatan pembangunan. Salah satu yang diusulkan masuk pada RPJMN adalah Mayor Proyek Pembangunan Kota Baru Sofifi. Beliau mengungkapkan, Sofifi hingga saat ini masih berstatus Desa dan berada di wilayah Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, Ini adalah sebuah kondisi yang tidak lazim terjadi, padahal dalam UU No 46 Tahun 1999 telah menetapkan Sofifi sebagai Ibu kota Provinsi Maluku Utara. (Times Indonesia) Sebagai ibu kota provinsi, pembangunan Sofifi terus dilakukan.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Tentang RTR Kepulauan Maluku mengenai Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman di Kepulauan Maluku, dijelaskan bahwa Kota Tidore merupakan kota dengan fungsi kota PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dengan Jenis Pelayanan sebagai Pusat Pelayanan Tersier Pemerintahan dan Perkebunan.

Terkait dengan peran dan posisi Kota Tidore Kepulauan dalam Provinsi Maluku Utara dan keberadaan kota Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara, maka terdapat pusat pelayanan kegiatan dalam wilayah perencanaan dengan tingkat hierarki yang berbeda. Berikut ini tabulasi hierarki pusat pelayanan dalam wilayah perencanaan:

Hierarki	Pusat Pelayanan Kegiatan	Skala Pelayanan	Wilayah	Fungsi
I	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Regional	kelurahan Soasio,	Melayani seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten/Kota di sekitarnya yang masuk dalam satuan wilayah pengembangan yang sama, yaitu: Ternate dan Tidore
II	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kota	Kota Sofifi	Melayani Kota dalam bidang pemerintahan, jasa dan perdagangan
III	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub-PPK)	Wilayah Kawasan	Soaso Akelamo Payahe Lifofa	Pusat kegiatan baru untuk melayani daerah Oba dan Oba Selatan dengan tujuan memajukan daerah selatan
IV	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Lokal Kecamatan	Semua ibukota kecamatan (Tomagoba, Gurabati, Rum, Tosa, Sofifi, Loleo, Payahe dan Lifofa)	Melayani wilayah kecamatan dan dibawahnya untuk kegiatan pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa.

Rencana Hierarki, Pusat Pelayanan dan Skala Layanannya

Sumber: RTRW Kota Tidore Kepulauan

Rencana pengembangan kawasan perkantoran dan pusat pemerintahan di wilayah perencanaan dilakukan di tiga lokasi utama, yaitu Kawasan perkantoran dan pemerintahan ditetapkan berada di Soasio dan Sofifi. Soasio merupakan perkantoran skala kota, Sofifi perkantoran skala provinsi.

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden yang berisi tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Terdapat 9 poin inti yang menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Kota Sofifi merupakan salah satu fokus utama pembangunan Indonesia saat ini. Maka dari itu, pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai sangat dibutuhkan agar dapat memwadahi aktivitas kegiatan kantor sehari-hari dan tanggap terhadap perkembangan zaman supaya para pekerja dapat mencapai efektifitas dan efisiensi kerja.

Maka permasalahannya dapat dirumuskan: "Menciptakan kondisi perkantoran yang efektif dan efisien bagi pegawai kantor BPKP Provinsi Maluku Utara"

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan perencanaan dan perancangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara ini sebagai acuan dasar dalam mencari konsep rancangan yang dapat mengakomodasi pengguna kantor, juga dapat menjadi referensi untuk perwakilan kantor BPKP lain di seluruh Indonesia, agar pengguna dapat menggunakan ruang secara nyaman sehingga produktivitas kerja dapat dihasilkan.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penyusunan laporan perencanaan dan perancangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara ini diharapkan dapat menjadi referensi selanjutnya dalam perancangan kantor Perwakilan BPKP, serta mahasiswa ataupun masyarakat umum yang membutuhkan.

1.5 Lingkup Pembahasan

Secara spasial penyusunan laporan perencanaan dan perancangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara ini dibatasi dengan deliniasi tapak perancangan dengan memperhatikan konteks lingkungan, serta substansi penyusunan laporan ini dibatasi oleh pemahaman terhadap objek serta program perencanaan dan perancangan kantor perwakilan BPKP.

1.6 Metode Pembahasan

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah:

- Studi Literatur dan Preseden

Dilakukan untuk memahami dan mendalami tipe objek arsitektur yang akan dirancang. Selain itu, pemahaman perkembangan gagasan rancangan perlu dilakukan agar rancangan tersebut nantinya tersintesis dengan baik.

- Survey Lapangan

Survey lapangan dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam mengklasifikasi tipe dan hubungan ruang dalam bangunan.

- Dokumentatif

Dilakukan dengan mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Caranya adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto yang dihasilkan.

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang rumusan pemahaman objek arsitektur yang akan menjadi fokus perencanaan dan perancangan yang terungkap di latar belakang serta rumusan masalah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi rangkuman pengetahuan yang telah ada tentang tipe objek arsitektur yang digunakan menjadi fokus rancangan.

BAB III : TINJAUAN FENOMENA DAN LOKASI

Bab ini berisi data-data yang akan menjadi bahan analisis pada Bab IV. Bab ini membahas tentang fenomena objek perancangan, keadaan lokasi dari objek rancangan, calon pengguna dari bangunan, dan data-data lainnya.

BAB IV : PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR

Bab ini berisi pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh program ruang dan program arsitektur rancangan.

BAB V : PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR

Bab ini menunjukkan hasil dari seluruh pendekatan yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadi pedoman dalam proses eksplorasi dan perancangan.

DAFTAR PUSTAKA

1.8 Alur Pikir

